



Globalisasi sebagai Ancaman Non-Tradisional: Erosi Identitas Budaya dan Sejarah Nasional Indonesia di Era Digital

Zaky Ruzbihan

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Penulis Korespondensi: zruzbihan@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of globalization is rapidly expanding and influencing nearly every aspect of life. Foreign cultures are entering Indonesia through various digital platforms. If left unchecked, these external cultural influences could erode the nation's identity and history. This study examines how cultural heritage and national history are increasingly being eroded by globalization, with a primary focus on the role of the digital age as a catalyst for this acceleration. The researcher employed a literature review method using a qualitative-descriptive approach. The results of the analysis are clear: the erosion of Indonesia's cultural identity has been categorized as a non-traditional threat. This is multidimensional, transcends national borders, involves global digital corporations, and is now recognized as a threat to national security. Social media and digital platform algorithms accelerate this process, particularly among Gen Z. Ali Khamenei's thoughts on cultural warfare are highly relevant for understanding the current situation. The impacts span numerous aspects from social stability, ideology, and the economy to politics and defense. The researchers recommend that the government strengthen cross-sectoral coordination, expand the BPIP and DPPI programs into the digital realm, revitalize cultural and history curricula, and promote local culture through more innovative methods on digital platforms*

Keywords: *Cultural War; Erosion Cultural Identity; Globalization; Human Security; Non-Traditional Threats.*

Abstrak. Fenomena globalisasi berkembang pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Budaya asing datang ke Indonesia lewat berbagai platform digital. Apabila dibiarkan, pengaruh budaya dari luar ini bisa mengikis identitas dan sejarah bangsa. Penelitian ini membahas bagaimana warisan budaya dan sejarah nasional semakin tergerus oleh globalisasi, dengan fokus utama pada fungsi era digital sebagai pendorong percepatan. Peneliti memakai metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil analisis terlihat jelas: erosi identitas budaya Indonesia telah dikategorikan sebagai ancaman non-tradisional. Hal ini bersifat multidimensi, melampaui batas negara, melibatkan korporasi digital global, dan sekarang diakui sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Media sosial dan algoritma platform digital mempercepat proses ini, terutama di kalangan Gen Z. Pemikiran Ali Khamenei tentang perang budaya sangat relevan untuk memahami situasi sekarang. Dampaknya mencakup banyak aspek mulai dari stabilitas sosial, ideologi, ekonomi, politik, hingga pertahanan. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas program BPIP dan DPPI ke ranah digital, merevitalisasi kurikulum budaya dan sejarah, serta mempromosikan budaya lokal dengan cara-cara yang lebih inovatif di platform digital.

Kata kunci: Ancaman Non-Tradisional; Erosi Identitas Budaya; Globalisasi; Human Security; Perang Budaya.

1. LATAR BELAKANG

Hari ini, globalisasi benar-benar telah menyusup ke setiap sudut kehidupan kita, terutama untuk generasi Z (Iwan Setiawan, 2024). Anak-anak muda tumbuh di tengah derasnya arus informasi dan sering kali justru terseret di dalamnya tanpa sadar. Budaya luar cepat sekali mempengaruhi mereka cara berpakaian, berbicara, sampai gaya bergaul pun tak luput (Ashri Rahmatia, 2024). Padahal, kita punya Pancasila sebagai pijakan nilai, tapi makin banyak remaja Indonesia yang perlahan melepas nilai-nilai itu dalam kesehariannya. Fenomena ini makin terasa karena digitalisasi, yang membuat mereka lebih memilih berlama-lama di depan ponsel, sibuk di media sosial ketimbang berbincang langsung dengan teman atau keluarga. Padahal, komunikasi tatap muka jelas lebih kuat mengikat rasa dan emosi. Manusia memang

mahluk sosial mereka butuh interaksi nyata, tidak sekadar teks di layar gawai. Lihat sekarang, individualisme makin kentara, sementara nilai kebersamaan yang dulunya jadi ciri khas bangsa pelan-pelan mulai luntur (Ashri Rahmatia, 2024).

Akses informasi digital yang begitu mudah ternyata juga membawa dampak yang tidak semuanya baik. Generasi muda meniru gaya hidup, bahasa, sampai pola pikir dari seluruh dunia tanpa saring. Akibatnya, banyak yang melupakan, bahkan sama sekali tidak mengenal budaya mereka sendiri (Rachman, 2025). Nilai-nilai asing masuk halus dan perlahan menggeser yang diwariskan sejak dulu. Identitas Indonesia jadi makin samar. Anak muda semakin asing dengan budaya, bahasa, sejarah, dan karakter bangsanya sendiri. Erosi budaya kian terasa sebab mereka lebih tertarik menangkap tren global daripada memahami dan menjaga kebudayaan sendiri. Konsep *cultural security* pun menjadi taruhan besar bagi masa depan bangsa. Mirisnya, banyak pemuda bahkan sudah tidak tahu kisah sejarah, adat, atau bahasa daerahnya sendiri (Cakranegara, 2020). Nama-nama kerajaan besar, kisah pahlawan seperti Gajah Mada saja nyaris tak lagi muncul di obrolan mereka. Yang lebih populer di kepala mereka justru musik K-pop atau tokoh idola Barat. Pengetahuan tentang sejarah Indonesia biasanya baru muncul ketika mereka kuliah—dan itu pun hanya kalau kebetulan dosen menyinggungnya.

Sekarang, digitalisasi jadi motor utama kemunduran budaya, sejarah, dan bahasa. Media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok banjir dengan arus budaya asing (Megawati Khoirunisa dkk., 2023). Linimasa anak muda dipenuhi konten kreator luar, bahasa asing, bahkan slang yang tak pernah kita miliki sebelumnya. Sayangnya, kebanyakan dari mereka kurang menyadari pentingnya menjaga budaya sendiri. Padahal, kita sebetulnya bisa menggunakan jalur digital juga diplomasi budaya atau konten edukasi tentang sejarah, bahasa, dan budaya Indonesia. Sayangnya, itu hal yang belum banyak mendapat perhatian serius. Di tengah derasnyanya arus global, identitas bangsa seolah semakin mudah larut. Anehnya, populasi kita yang besar justru jadi pasar empuk budaya luar. Tingkat konsumsi pun makin tinggi (Nailla, 2026). Semua tantangan ini berimbas pada ketidakstabilan sosial, ekonomi, hingga budaya. Kebanyakan anak muda sekarang meniru panutan luar, bukan lagi mencari teladan dari dalam negeri. Dari luar, globalisasi (khususnya lewat jalur digital) memang tampak keren. Tapi, ini sebenarnya alat modern untuk perlahan meruntuhkan keamanan sebuah negara (Nemeth, 2015). Perang masa kini tak lagi soal senjata budaya global bisa masuk halus lewat musik, fesyen, gaya hidup, dan tanpa sadar mulai “menguasai” masyarakat. Indonesia termasuk korban terbesar. Banyak generasi muda yang lebih hapal budaya asing ketimbang budaya sendiri. Itulah wajah baru “*international security*” di era ini.

Masalah globalisasi dan identitas budaya ini sudah cukup lama jadi perhatian akademisi. Rahayu dan rekan-rekannya menyoroti kalau globalisasi benar-benar membawa perubahan besar di budaya Indonesia (Rahayu dkk., 2025). Generasi muda sekarang gemar meniru budaya Barat, dari cara berpakaian, berbicara, sampai ke perilaku harian. Studi mereka memetakan hilangnya bahasa daerah, tradisi lokal, dan dominasi budaya pop global seperti K-pop atau Hollywood di kehidupan sehari-hari (Rahayu dkk., 2025). Data mereka bicara banyak dari sekitar tujuh ratus bahasa daerah, hampir seratus empat puluh nyaris punah karena tekanan bahasa asing di pendidikan dan media (Rahayu dkk., 2025). Hanya saja, penelitian ini berhenti pada perspektif sosiologis-antropologis. Belum menjelaskan secara tuntas mengapa erosi budaya layak dipandang sebagai ancaman dalam konteks hubungan internasional. Sisi digitalisasi juga kurang disentuh.

Di sisi lain, Nailla menghadirkan konsep human security dalam kajiannya di Indonesia (Nailla, 2026). Ada ide menarik tentang cultural security sebagai bagian dari keamanan manusia. Nailla menyorot bahwa kebijakan kependudukan nasional belum benar-benar memasukkan community security dan cultural security dalam programnya (Nailla, 2026). Ia juga mencatat soal perubahan struktur keluarga, usia nikah yang terus naik, dan pola rumah tangga yang semakin beragam semua ini melemahkan proses pewarisan nilai antar generasi. Tapi, Nailla masih lebih fokus ke kebijakan kependudukan dan belum benar-benar menyentuh core problem: erosi identitas budaya akibat globalisasi. Peran era digital pun nyaris tak disentuh dalam analisisnya.

Dari perspektif hubungan internasional, Alami membahas isu keamanan non-tradisional dalam agenda politik luar negeri Indonesia (Alami, 2015). Ada lima karakter ancaman non-tradisional menurutnya: masalahnya multidimensi dan lintas negara, melibatkan aktor negara dan non-negara, dipengaruhi dinamika domestik dan global, butuh kerja sama internasional, dan sudah dinarasikan sebagai isu keamanan (Alami, 2015). Dia mengulas isu besar seperti perubahan iklim, energi, migrasi, dan terorisme. Tapi, masih ada celah besar dalam risetnya: Alami belum memasukkan erosi budaya dan identitas nasional sebagai masalah non-tradisional, padahal kelima karakter ancaman itu sangat cocok diaplikasikan ke fenomena ini.

Kalau dibandingkan, jelas ada tiga kekosongan dari tiga penelitian tadi. Pertama, celah perspektif: Rahayu dkk membahas erosi budaya lebih sebagai studi kebudayaan, belum dari kacamata hubungan internasional atau keamanan non-tradisional (Rahayu dkk., 2025). Kedua, celah isi: Nailla bicara soal human security dan cultural security, tetapi fokus utamanya tetap pada kebijakan kependudukan, bukan pada erosi identitas akibat globalisasi dan digitalisasi (Nailla, 2026). Sementara Alami, meskipun membahas ancaman non-tradisional, belum

menyorot kerentanan budaya atau identitas nasional (Alami, 2015). Ketiga, celah waktu: belum ada yang secara spesifik mengaitkan erosi identitas budaya langsung dengan era digital padahal, hari ini, digitalisasi dan media sosial adalah pintu utama merebaknya budaya asing ke kehidupan anak muda Indonesia.

Penelitian ini ingin mengisi celah-celah itu. Penelitian ini bertujuan mengkaji erosi identitas budaya dan sejarah nasional Indonesia akibat globalisasi, memandangnya sebagai ancaman non-tradisional, lalu menyoroti bagaimana era digital mempercepat proses itu. Lebih lanjut, penelitian ini ingin mengidentifikasi bentuk.

2. KAJIAN TEORITIS

Untuk menggali fenomena erosi identitas budaya dan sejarah nasional Indonesia, penelitian ini menggunakan beberapa konsep dan teori pokok dari studi hubungan internasional dan ilmu sosial. Pertama, ada konsep ancaman nontradisional yang menjadi landasan analisis. Dalam pandangan Alami (2015), ancaman ini punya lima ciri penting: multidimensi, menembus batas negara, melibatkan aktor negara maupun non-negara, dipengaruhi dinamika domestik dan internasional, dan menuntut kerja sama internasional untuk mengatasinya. Kelima ciri ini digunakan untuk menilai apakah erosi identitas budaya bisa dikategorikan sebagai ancaman non-tradisional. Selanjutnya, ada kerangka human security atau keamanan manusia, konsep yang mula-mula diusung oleh UNDP dan dikembangkan lebih lanjut oleh Nailla (2026). Pada titik ini, keamanan bukan cuma tentang melindungi negara dari serangan militer, tapi soal perlindungan terhadap individu dan komunitas dari segala bentuk ketidakamanan, termasuk ancaman terhadap budaya. Nailla memperluasnya dengan memperkenalkan dimensi cultural security sebuah upaya melindungi warisan budaya, tradisi, bahasa, dan nilai bangsa dari tekanan budaya asing yang bisa mematikan karakter bangsa itu sendiri.

Tak berhenti di situ, analisis juga memakai konsep perang budaya ala Alm. Ayatullah Ali Khamenei dalam Perang Kebudayaan. Menurutnya, ancaman zaman sekarang yang paling berbahaya bukan lagi perang fisik, tapi perang senyap di ranah kebudayaan lewat media, pendidikan, hingga propaganda (Faisal Tehrani, 2026). Ia membuat perbedaan tegas: pertukaran budaya bisa positif, seperti vitamin yang menyehatkan, tetapi perang budaya justru menggerogoti identitas bangsa, persis seperti racun. Di tengah gelombang globalisasi yang makin deras, Indonesia berisiko jadi sasaran perang budaya model baru ini.

Referensi penelitian terdahulu ikut memperkaya diskusi. Rahayu dkk .(2025) menunjukkan bahwa globalisasi memang mengubah nilai-nilai budaya Indonesia. Generasi muda banyak yang mengadopsi gaya hidup Barat, kehilangan tradisi lokal. Penelitian mereka memetakan erosi itu dari bahasa daerah yang kian jarang dipakai sampai dominasi budaya pop dunia. Masalahnya, pendekatan mereka masih cenderung sosiologis-antropologis, belum melihat erosi budaya sebagai ancaman dari perspektif hubungan internasional. Tambahan lagi, mereka belum melihat peran era digital dalam mempercepat laju erosi budaya. Sementara itu, Nailla (2026) menawarkan kerangka cultural security dalam bahasan human security di Indonesia. Ia menyoroti kebijakan kependudukan nasional yang masih belum secara penuh memasukkan aspek community security dan cultural security. Tapi, fokus bahasan Nailla masih dominan pada soal kependudukan belum menjadikan erosi identitas budaya akibat globalisasi dan digitalisasi sebagai kajian utama.

Di lain pihak, Alami (2015) mengulas isu-isu keamanan non-tradisional dalam ranah politik luar negeri Indonesia: perubahan iklim, keamanan energi, migrasi, dan terorisme. Analisisnya tajam dalam menyoroti kendala koordinasi lintas sektor dan absennya peta jalan yang jelas. Tapi ada kekosongan besar isu erosi identitas budaya belum dianggap sebagai ancaman non-tradisional, padahal kriteria yang dipakai Alami pas untuk diterapkan pada isu ini. Dari ketiga penelitian itu, ada tiga celah besar yang muncul. Pertama, celah perspektif: pendekatan studi kebudayaan Rahayu dkk. Belum membawa bahasan pada dimensi hubungan internasional atau keamanan nontradisional. Kedua, celah substansi: Nailla sudah bicara human security dan cultural security, tetapi objek kajiannya masih sempit pada kebijakan kependudukan, sedangkan Alami belum melihat isu identitas budaya sama sekali. Ketiga, celah temporal: belum ada yang membedah dampak era digital pada erosi identitas budaya, padahal arus informasi dari media sosial menambah derasny masuknya budaya asing ke keseharian generasi muda.

Penelitian ini hadir untuk mengisi semua celah itu. Dengan landasan ancaman non-tradisional (Alami, 2015), human security dan cultural security (Nailla, 2026), serta konsep perang budaya (Khamenei), penelitian ini menempatkan erosi identitas budaya dan sejarah nasional Indonesia secara tegas sebagai ancaman keamanan dan menyoroti era digital sebagai faktor kunci yang mempercepat proses ini. Melalui pendekatan ini, penelitian ini menawarkan pijakan teoretis yang kuat bagi upaya pelestarian identitas budaya dalam konteks ketahanan nasional Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjadikan ancaman nontradisional sebagai pisau analisis utama, sekaligus mengandalkan kerangka human security untuk membedah persoalan. Fokus kajiannya tertuju pada bagaimana arus globalisasi, terutama lewat derasnya masuk budaya asing dari platform digital, ikut menggerus identitas budaya dan pemahaman sejarah di Indonesia. Lewat sudut pandang ancaman non-tradisional, penelitian ini mencoba membaca fenomena hilangnya nilai-nilai lokal, bergesernya pemakaian bahasa daerah, rapuhnya tradisi suku, serta surutnya kesadaran sejarah bangsa. Semua gejala itu, menurut peneliti, sudah cukup kuat buat digolongkan sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pendekatannya kualitatif-deskriptif. Kenapa dipilih? Karena semua data memang diambil dari bacaan. Mulai dari jurnal, buku, dokumen kebijakan, sampai tulisan-tulisan lain yang masih nyambung dengan topik. Peneliti tidak turun ke lapangan. Tidak ada wawancara. Tidak ada angket. Cukup membaca, mencatat, lalu menarik benang merah dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan bahan, peneliti melakukan penelusuran lewat beberapa basis data akademik. Sebut saja Google Scholar, SINTA, sama Portal Garuda. Kata kunci yang dipakai macam-macam: "globalisasi", "identitas budaya", "ancaman non-tradisional", "human security", "cultural security", dan "era digital". Dari situ, bahan-bahan yang terkumpul lalu disortir. Yang relevan dipakai, yang kurang pas dikesampingkan.

Setelah bahan terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis. Caranya deskriptif-kualitatif. Peneliti mulai dengan membaca satu per satu literatur, mencatat temuan-temuan penting, lalu mengelompokkan sesuai tema. Misalnya, mana yang termasuk bentuk erosi, mana yang bicara penyebab, mana yang ngebahas dampak. Setelah dikelompokkan, temuan-temuan itu kemudian dihubung-hubungkan dengan teori ancaman non-tradisional dan human security. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari semua proses itu. Supaya hasilnya bisa dipegang, peneliti juga nerapin triangulasi sumber. Artinya, setiap informasi dari satu literatur dicek lagi di literatur lain yang kredibel. Tujuannya biar data yang dipakai konsisten dan gak asal comot. Dengan begitu, semua kesimpulan yang ditulis benar-benar berdiri di atas telaah pustaka yang bisa dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Erosi Identitas Budaya dan Sejarah di Indonesia

Pengikisan identitas budaya di Indonesia tak langsung muncul tanpa sebab yang jelas. Fenomena ini muncul dari proses panjang dan kuatnya arus globalisasi yang merembes masuk ke semua lini kehidupan. Berdasarkan studi literatur, paling tidak ada tiga bentuk pokok dari pergeseran ini: pengikisan bahasa lokal, berkurangnya tradisi lokal dan nilai-nilai luhur bangsa, serta menipisnya pemahaman sejarah bangsa.

Pertama, kita bisa lihat dampaknya pada bahasa daerah. Rahayu dkk. (2025) melaporkan bahwa dari sekitar tujuh ratus bahasa daerah yang masih ada di Nusantara, hampir seratus empat puluh sudah terancam punah. Hal ini tidak terlepas dari semakin besar pengaruh bahasa asing—terutama bahasa Inggris—di sekolah maupun di media. Bahasa Indonesia baku saja sekarang makin jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari, digantikan oleh bahasa gaul yang mengandung banyak serapan asing. Anak muda pun jadi asing dengan bahasa ibu mereka sendiri. Mereka justru terkadang lebih nyaman bicara menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa daerah, seakan-akan itu prestise tersendiri.

Kedua, terjadi perubahan signifikan pada adat istiadat lokal serta nilai-nilai fundamental bangsa. Globalisasi mengubah cara orang Indonesia melihat diri dan lingkungannya (Rahayu dkk., 2025). Generasi sekarang cenderung meniru gaya hidup Barat dari cara berpakaian, berbicara, bersikap, sampai gaya bersosialisasi. Nilai-nilai kolektivisme seperti gotong royong dan kebersamaan, yang lama menjadi ciri khas Indonesia (Rahayu dkk., 2025), pelan-pelan terpinggirkan oleh individualisme ala Barat. Upacara adat, ritual, dan kearifan lokal mulai ditinggalkan karena dianggap kuno, gak trendy, atau ketinggalan zaman. Pop culture global semacam K-pop dan Hollywood belakangan jauh lebih populer di mata anak muda daripada seni tradisional seperti wayang, gamelan, dan tari daerah.

Ketiga, erosi juga terjadi pada kesadaran sejarah bangsa. Penelitian soal ini memang belum banyak, tapi tanda-tandanya jelas. Banyak anak muda sekarang tidak lagi memahami detail peristiwa bersejarah dalam proses pembentukan bangsa seperti Sumpah Pemuda, Proklamasi, Agresi Militer Belanda, atau Bandung Lautan Api. Nama-nama pahlawan nasional seperti Cut Nyak Dien, Pattimura, atau Sultan Hasanuddin mulai lenyap dari ingatan. Pendidikan sejarah sering disampaikan dengan kaku dan jauh dari pengalaman sehari-hari, belum lagi kurangnya konten digital sejarah Indonesia yang menarik dan gampang diakses oleh generasi muda.

Tiga bentuk erosi ini saling berhubungan, bukan fenomena terpisah. Bahasa daerah yang punah, kerap mengubur tradisi lisan yang dibawanya. Nilai gotong royong yang pudar mengakibatkan masyarakat semakin terpecah satu sama lain. Kesadaran sejarah yang redup membuat rasa kebangsaan dan nasionalisme generasi muda ikut luntur. Erosi identitas budaya dan kesadaran sejarah sangat tidak bisa dianggap sebelah mata. Ini sudah jadi ancaman serius yang butuh perhatian nyata.

Globalisasi sebagai Penyebab Utama Erosi

Sekarang, globalisasi sudah jadi bagian sehari-hari. Informasi dari berbagai belahan dunia mengalir cepat, bahkan cukup dengan satu sentuhan di layar ponsel (Nurhaidah, 2015). Kita bisa melihat globalisasi muncul secara nyata lewat infrastruktur telekomunikasi, apalagi di kota-kota besar Indonesia. Tak sedikit orang sepakat bahwa ada banyak sisi positif dari gelombang globalisasi. Pengetahuan bertambah, teknologi makin maju, dan standar hidup pelan-pelan ikut naik. Tapi di Indonesia, justru sisi baik ini sering luput dari perhatian. Banyak orang mengira semua yang terjadi sekarang murni membawa dampak baik. Padahal, faktanya tak sesederhana itu. Contohnya, gaya hidup konsumtif yang makin dalam mencengkeram masyarakat (INDEF, 2019).

Data dari INDEF tahun 2019 jelas menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia sudah sangat konsumtif di dunia digital. 147,1 juta orang berbelanja online lewat e-commerce. Barang elektronik dan fashion malah jadi primadona, menguasai lebih dari separuh total belanja (51,1%), dengan nilai transaksi tembus USD 11,13 miliar.

Bukan cuma soal belanja. Globalisasi juga membentuk pola hidup yang kian individualis. Orang makin sering sibuk dengan HP dan asyik sendiri, ketimbang ngobrol, bercanda, atau sekadar nongkrong bareng teman dan keluarga. Pengaruh budaya Barat perlahan-lahan masuk. Anak muda kini cenderung memilih baju model terbuka dan pendek, seolah tak lagi peduli pada cara berpakaian menurut adat atau budaya lokal. Bahkan, candaan seperti "biar kayak bule" sering terdengar. Buat Indonesia, globalisasi memang membawa arus perubahan. Ada hal positif yang tak bisa kita abaikan, tapi pengaruh negatifnya pun jelas terasa—kadang perlahan, kadang langsung. Nilai, budaya, dan moral yang lama terjaga mulai luntur. Anak muda sekarang cenderung meniru stigma luar, tanpa benar-benar beradaptasi dengan konteks budaya sendiri.

Ancaman Non-Tradisional dan Erosi Identitas Budaya

Dalam perkembangan studi hubungan internasional hari ini, pemahaman soal keamanan sudah jauh berkembang sejak era Perang Dingin berakhir (Pugu, 2025). Sekarang, keamanan bukan lagi sebatas pertahanan negara dari serangan militer. Definisinya jadi lebih

luas, merambah ke ancaman-ancaman baru yang lintas batas dan multidimensi. Pergeseran paradigma yang dicatat oleh Ramli, Othman, Idris, dan Daud (2012) ini mencerminkan betapa eratny keterkaitan antarnegara dan makin besarnya peran isu nonmiliter dalam agenda keamanan di masa kini. Di tengah arus ini, konsep keamanan budaya (cultural security) mencuri perhatian para akademisi global. *Handbook of Cultural Security* (2018) menekankan bahwa keamanan budaya tumbuh dari kerangka "keamanan nontradisional" dan berusaha merumuskan makna 'rasa aman' dalam berbagai konteks budaya. Meng, Li, Wang, & Sun (2025) dalam kajian bibliometrik mereka menunjukkan globalisasi mempercepat pertukaran budaya, tetapi juga meningkatkan homogenisasi. Dampaknya? Rasa aman individu dan komunitas ikut terancam.

Di Indonesia sendiri, Nailla (2026) menyoroti lemahnya integrasi aspek community security dan cultural security dalam kebijakan kependudukan. Padahal, di tengah transisi demografis, keamanan budaya justru mendesak untuk dijaga. Lemahnya transmisi nilai budaya antargenerasi membawa risiko nyata pada identitas nasional (Nailla, 2026). Soal identitas budaya ini, Listriyani Agustian & Himawati (2024) juga menegaskan bahwa di era Society 5.0, tantangan menjaga warisan budaya di masyarakat multikultural makin ruwet. Herriman (2010) dalam artikelnya membedah konsep perang budaya pasca-Perang Dunia II di Indonesia. Menariknya, konsep 'rakyat' jadi pusat pemahaman kebangsaan. Tapi sayangnya, konsep ini sering dimanfaatkan secara politis dan budaya (Herriman, 2010). Studi antropologi soal keamanan di Indonesia juga mencatat bahwa institusi formal kerap melihat Islam—khususnya varian yang mereka anggap radikal dan sebagai ancaman utama bagi identitas nasional (Security, Islam, and Indonesia, 2024). Sementara itu, Ozer & Obaidi (2022) berpendapat globalisasi telah mengacaukan tatanan sosial-budaya tradisional, membuat identitas dan rasa memiliki seseorang menjadi rentan. Perjumpaan budaya yang semakin intens sering menimbulkan perilaku eksklusif sebagai respons atas ketakutan terhadap globalisasi serta ketidakstabilan konteks (Ozer & Obaidi, 2022).

Aminah, Wardhani, Dugis, & Susanto (2025), melalui penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, melihat bahwa pembangunan pariwisata global untuk kebutuhan nation branding ternyata berpotensi menimbulkan ketegangan sosial budaya di komunitas lokal. Ambisi negarayang mendorong kapitalisme tanpa mempertimbangkan suara masyarakat setempat berpotensi membuat masyarakat kehilangan pegangan atas nilai sosial, budaya, bahkan agama dalam jangka panjang. Dari sudut pandang Islam kontemporer, Allahyari, Mohammadzadeh, Ashrafi, & Shariati (2022) menyoroti ancaman seperti rusaknya keyakinan agama, konsumerisme, invasi budaya, pelupaan identitas nasional dan bahasa ibu, serta ruang

virtual yang kerap jadi lahan subur kemerosotan moral. Membaca berbagai temuan ini sangat menarik: tidak diragukan lagi, pengikisan identitas budaya serta sejarah nasional Indonesia lebih dari sekadar isu sosial. Ia sudah masuk ke inti persoalan keamanan nontradisional dalam studi hubungan internasional modern.

Human Security: Kerangka untuk Memahami Krisis Identitas

Konsep keamanan manusia, yang diperkenalkan UNDP pada 1994, memberikan perspektif baru perihal keamanan. (Ramli, Othman, Idris, & Daud, 2012) mengatakan pemikiran ini memiliki tujuh aspek; mulai dari lingkungan, ekonomi, kesehatan, individu, komunitas, politik hingga pangan. UNESCO menambahkan satu aspek lagi, aspek perlindungan budaya, dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya. (Nailla, 2026) pernah membahas implementasi human security di Indonesia dan menghadapi masalah tentang koordinasi. Kebijakan yang ada masih terpisah-pisah. Banyak sektor bergerak sendiri-sendiri, sehingga semua aspek tidak terakomodasi khususnya di bidang keamanan ekonomi, komunitas, politik, dan budaya. Fragmentasi ini menyebabkan program kerap tumpang-tindih dan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien.

Perspektif keamanan komunitas ini sebelumnya sudah dibahas (Canfield, 2023) dari Australian National University didalam tesisnya. Menurut dia, keamanan komunitas itu mengenai perasaan aman yang timbul melalui hubungan seseorang dengan kelompoknya. Konsep ini jarang dapat perhatian di literatur Hubungan Internasional. United Nations Development Programme juga pernah mengangkat mengenai bahasa tradisional, budaya, dan kerentanan masyarakat adat—hal ini termasuk dalam ketidakamanan komunitas. Canfield menekankan, dalam konteks warisan budaya, keamanan komunitas berarti aman dalam hidup dan punya rasa memiliki. Riset yang dilakukan oleh (Fadilla, Alfiah, & Maftucha, 2025) menemukan, fenomena globalisasi membawa transformasi besar yang menyebabkan warisan budaya Indonesia menghadapi ancaman. Seiring waktu budaya menjadi homogen, nilai-nilai tradisional terabaikan, dan generasi muda makin tidak memperhatikan terhadap kearifan lokal. Mereka mengusulkan teknologi digital seperti dokumentasi 3D, media sosial, atau AR digunakan untuk mempromosikan budaya kepada Generasi Z dan Alpha.

(Rofi'i & Halid, 2025) juga membahas tentang budaya populer asing. Masuknya budaya luar melalui teknologi digital jelas memengaruhi nilai dan cara hidup, terutama generasi muda yang jadi makin suka budaya luar. Tapi, mereka nggak cuma melihat sisi negatif. Budaya asing juga bisa jadi kesempatan buat kembangkan kreativitas dan inovasi dalam budaya lokal. mereka menawarkan pendekatan baru namanya "The Bangi Approach to Human Security" (BAGHUS), mereka menambahkan aspek keamanan sosial dan mengakui keterkaitan antara

keamanan individu dan komunitas. Apabila memakai kerangka human security, erosi identitas budaya dan sejarah nasional tuh bukan hal yang bisa dibiarkan begitu aja. Negara punya tanggung jawab buat melindungi warganya dari ancaman ini. Seperti halnya negara melindungi dari bencana alam atau ancaman fisik. Jika negara tidak mampu menjaga keamanan budaya, artinya juga tidak berhasil memberikan hak dasar kepada rakyatnya melestarikan identitas budaya.

Perang Budaya: Perspektif Ali Khamenei tentang Ancaman Senyap

Peringatan tentang ancaman di area budaya bukan sesuatu yang baru. Para pemikir dari berbagai peradaban sudah lama mengingatkan tentang ini. Alm. Ayatullah Ali Khamenei, Mantan Pemimpin Tertinggi Iran, dalam bukunya *Perang Kebudayaan*, menegaskan bahwa di era modern, pertempuran paling sengit justru terjadi di ranah budaya, bukan di medan tempur bersenjata (Faisal Tehrani, 2026). Musuh tidak lagi butuh merebut wilayah dengan kekuatan militer; mereka menyusup lewat propaganda, media, dan perang spiritual, langsung menysar hati dan pikiran manusia. Khamenei menyebut perang budaya sebagai kekerasan politik atau ekonomi yang bergerak halus layaknya teror senyap, sebuah istilah yang dikemukakannya untuk menundukkan bangsa lain di bawah dominasi musuh. Target utamanya jelas: mengganti budaya lokal dengan budaya musuh, dalam hal ini, budaya Barat. Skema perang budaya ini berjalan lewat tiga tahap: pertama, meruntuhkan keyakinan agama; kedua, memutus keterkaitan umat dengan nilai-nilai revolusi; ketiga, mendorong generasi untuk merasa kecil agar takut bermimpi besar atau berkarya, lewat rasa takut dan ancaman

Strategi mereka, menurut Khamenei, termasuk memanfaatkan diaspora Iran yang rindu masa lalu, film, karya sastra, juga buku-buku dangkal yang tidak memancing kritis. Ditambah lagi, penyebaran produk porno yang sengaja didorong supaya generasi muda lemah dari sisi pikiran, kesehatan seksual, dan hidup dalam dunia fantasi yang kosong. Semua itu cuma satu tujuan: menanamkan kecintaan pada materialisme, membuat generasi muda terbuai pada tawaran peradaban Barat yang dianggap modern dan layak diikuti. Tanpa sadar, inilah kolonialisme budaya yang diam-diam masuk ke dalam masyarakat. Khamenei sendiri tegas membedakan antara pertukaran budaya yang sehat dan perang budaya yang merusak. Ia percaya pertukaran budaya penting, karena setiap bangsa memang butuh belajar dari bangsa lain. Pertukaran budaya memperkaya, ibarat suplemen bagi tubuh. Tapi perang budaya? Itu racun. Pertukaran budaya terjadi saat bangsa cukup kuat bertukar ide, sedangkan perang budaya menimpa bangsa yang sedang lemah dan rapuh.

Secara global, menunjukkan musuh sudah paham, menguasai wilayah dengan kekuatan militer sudah bukan zamannya; opini publik dan budaya sekarang jadi sasaran. Mereka mendesain perang propaganda dan spiritual untuk menggerus identitas religius, revolusioner, satu bangsa, pelan tapi pasti. Kemenangannya mudah dikenali: generasi muda mulai malu berbicara dalam bahasa ibu, meninggalkan tradisi, lebih bangga budaya asing. Bahasa jadi senjata utama karena memang inti sebuah bangsa. Di Indonesia, pola ini mulai terbaca. Anak muda lebih hafal lirik K-pop dibanding lagu daerah, lebih kenal aktor Hollywood ketimbang pahlawan nasional, dan lebih percaya diri memakai busana ala Barat daripada pakaian tradisional.

Konsep ini terasa sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Gelombang globalisasi yang tidak terkendali tampak seperti perang budaya senyap yang dijalankan Barat dan kekuatan global lain untuk memperluas pengaruh mereka. Film, musik, media sosial, dan beragam platform digital, pelan-pelan menanamkan nilai individualisme, materialisme, konsumerisme, juga gaya hidup Barat dalam keseharian generasi muda Indonesia. Tidak perlu paksaan, tidak perlu senjata. Cukup dengan mengubah cara berpakaian, berbicara, bergaul, dan berpikir, identitas bangsa bisa luntur tanpa terasa. Melawan perang budaya butuh lebih dari sekadar protes. Khamenei mendorong kebangkitan seni dan budaya lokal, memperkuat bahasa serta sastra nasional. Menyadari sejarah diri sendiri pun tak kalah penting. Dengan memahami akar sejarah dan budaya, bangsa lebih siap membangun kekuatan baru berbasis warisan masa lalu di era sekarang Pelajaran dari Iran jelas: melawan perang budaya itu soal strategi jangka panjang, pendidikan mesti dibenahi, media digerakkan, dan kesadaran kolektif terus diperkuat.

Peran Era Digital dalam Akselerasi Erosi Budaya

Era digital benar-benar mengubah cara kita mengakses informasi, berkomunikasi, dan menikmati budaya. Penelitian tentang ekspresi musik di TikTok dari Indonesia Timur (*Sounding Identity in the Digital Age*, 2025) menghadirkan gambaran yang menarik tentang bagaimana platform digital ikut membentuk identitas budaya. Hasilnya jelas—platform seperti TikTok membuka ruang baru yang terdesentralisasi untuk pengakuan budaya, membuat suara yang selama ini terpinggirkan dari Papua dan Maluku akhirnya didengar bahkan sampai ke ranah global. Lihat saja lagu “Nyong Timur” dengan penontonnya yang menembus 69 juta; digitalisasi benar-benar memberi peluang besar pada budaya lokal untuk tampil dan diakui, sesuatu yang dulu nyaris mustahil. Tapi ada sisi lainnya. Algoritma media sosial didesain supaya orang terus betah dan terhibur, dan biasanya yang diunggulkan itu ya konten-konten yang viral, sesuai selera global. Peneliti menemukan bahwa sistem semacam ini secara halus

menekan kreator untuk menyesuaikan diri, memilih gaya dan suara yang ramah pasar internasional. Ini tantangan besar dalam menjaga keotentikan ekspresi budaya lokal.

Di tengah kehidupan Society 5.0 (Listriyani, Agustian, & Himawati, 2024), memang ada sisi positif: kolaborasi antara masyarakat lokal dan global di platform digital bisa memperkuat pemahaman lintas budaya. Tapi risiko akulturasi bahkan pelunturan budaya asli juga tidak kecil. Generasi Z, misalnya (Farhan, 2025) anak-anak yang dari kecil sudah akrab dengan dunia digital sangat terpengaruh oleh paparan budaya global. Studi menemukan (Husada, 2025) adanya perubahan gaya hidup, menurunnya nilai-nilai tradisional, sampai makin jarang nya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, akibat dominasi konten asing di media sosial. Tak sedikit pula yang mulai menganggap budaya asing sebagai standar, sementara nilai-nilai kearifan lokal makin terpinggirkan. Para peneliti menawarkan solusi (Fadilla, Alfiah, & Maftucha, 2025). Teknologi digital seperti dokumentasi 3D, media sosial, sampai inovasi augmented reality (AR) bisa jadi alat penting untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda, baik Generasi Z maupun Alpha. Melestarikan warisan budaya bukan sekadar tuntutan moral, tapi memang sudah jadi kebutuhan mendesak agar identitas nasional tidak lenyap dalam arus globalisasi yang kian cepat. Strategi adaptasi lewat digitalisasi dianggap sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga ketahanan budaya lokal dari derasnya pengaruh budaya populer asing.

Akhirnya, era digital adalah jalan utama masuknya budaya asing, sekaligus ajang penting untuk mempertahankan dan mempromosikan identitas budaya sendiri. Tanpa strategi yang cerdas dalam memanfaatkan platform digital sebagai alat promosi, erosi identitas bakal semakin cepat, apalagi seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di kalangan generasi muda yang haus akan konten baru.

Dampak Erosi Identitas terhadap Ketahanan Nasional

Lunturnya identitas budaya dan sejarah nasional berpengaruh besar terhadap ketahanan nasional Indonesia. Menurut Pugu (2025) dalam tulisannya mengenai keamanan nontradisional menulis, ancaman terhadap identitas budaya mengganggu stabilitas sosial, mengikis kohesi masyarakat, dan merongrong ideologi bangsa. Ia menawarkan kerangka teoretis yang menempatkan keamanan budaya sebagai bagian penting dari ketahanan nasional. Kalau aspek ini diabaikan, efeknya bisa merambat ke banyak sektor lain. (Rofi'i dan Halid 2025) meneliti ketahanan budaya lokal dan menemukan tantangan serius di sana. Budaya lokal sebagai identitas bangsa semakin terdesak oleh perubahan nilai, gaya hidup, dan cara pandang, terutama di kalangan muda yang lebih mengidolakan budaya luar. Menurut mereka, menjaga keberadaan budaya daerah perlu strategi gabungan: edukasi, digitalisasi, dan kolaborasi. Dari

sudut pandang ideologi, (Rahma, 2025) menegaskan identitas nasional itu kunci sebagai alat pertahanan budaya, terutama di tengah arus globalisasi. Pancasila, ia bilang, berfungsi sebagai filter—menyaring masuknya nilai-nilai asing yang tidak cocok dengan karakter bangsa.

(Listriyani, Agustian, dan Himawati, 2024) memaparkan, pendidikan budaya yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, dan kebijakan pemerintah yang inklusif sangat penting di era Society 5.0. Generasi penerus, menurut mereka, harus paham betul tentang pentingnya menjaga dan merawat nilai budaya yang diwariskan. Sementara itu, (Fadilla, Alfiyah, dan Maftucha, 2025) menyebut dampak globalisasi memperumit upaya melindungi warisan budaya. Mereka khawatir akan munculnya keseragaman budaya dan pergeseran nilai tradisional ke arah yang makin individualis. (Farhan, 2025) juga menyoroti ancaman ini. Ia meneliti bagaimana erosi identitas nasional melemahkan rasa kebangsaan dan patriotisme generasi muda. Kalau masalah ini dibiarkan, bakal muncul generasi yang terputus dari akar budayanya sendiri. Farhan mendorong kolaborasi lintas sektor: pemerintah, pendidikan, dan industri kreatif perlu bersama-sama melindungi, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal.

Ini bukan cuma soal identitas, tetapi juga soal potensi ekonomi kreatif. Dampak lunturnya identitas budaya nyata tak hanya pada ketahanan sosial (karena kohesi masyarakat melemah), tapi juga pada ketahanan ideologi (Pancasila terpinggirkan), ekonomi (hilangnya peluang dari ekonomi kreatif berbasis budaya), dan politik (nasionalisme luntur). Jadi, melestarikan identitas budaya bukan urusan nostalgia semata. Ini kepentingan strategis yang menentukan masa depan bangsa.

Kebijakan yang Ada dan Kesenjangannya (BPIP dan DPPI)

Pemerintah Indonesia telah sepenuhnya memahami soal pentingnya menjaga identitas budaya dan ideologi Pancasila di tengah arus globalisasi yang makin deras. Hal ini terlihat dengan jelas dari langkah mereka membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tugas utama BPIP, seperti yang sudah banyak orang tahu, adalah merancang dan menjalankan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan terpadu. Salah satu inisiatif dari BPIP adalah lahirnya Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI). DPPI ini berposisi sebagai ujung tombak BPIP. Mereka yang secara langsung terjun ke lapangan untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila serta memupuk rasa nasionalisme pada generasi muda. DPPI dibentuk sesuai mandat BPIP, yang memberikan kepercayaan kepada para purna Paskibraka buat membangun wadah pengabdian, bahkan sampai ke tingkat daerah.

Bermula dari sini hadir Program GARUDA atau Gladian Sentra Paskibra untuk Indonesia. Program ini dibuat untuk menjadi ruang pembinaan anak muda dari 38 provinsi. Fokusnya ada tiga: menanamkan karakter kebangsaan, membangun kedisiplinan, dan melatih

jiwa kepemimpinan. GARUDA sebagai pemenuhan harapan tokoh pendiri Paskibraka supaya nilai-nilai luhur nggak cuma dimiliki oleh anggota Paskibraka saja, tapi juga pelajar di sekolah-sekolah dan daerah-daerah yang belum pernah bergabung. Kegiatan perdana GARUDA digelar tahun 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dengan tema "Bersatu, Berlatih, dan Berkarya untuk Indonesia Raya". Di tahun itulah lahir angkatan pertama GARUDA yang diberi nama "Adi Santati Abhita", artinya angkatan pertama yang pemberani. Ada 152 peserta, dua putra dua putri dari tiap provinsi, ikut pelatihan intensif selama empat hari tiga malam. Mereka bukan anggota Paskibraka, tapi pelajar aktif yang berprestasi dan memiliki nilai Tes Wawasan Kebangsaan paling tinggi saat seleksi Paskibraka 2025.

Selama pelatihan, peserta menetap di asrama dan rangkaian kegiatannya padat. Ada latihan PBB untuk membangun disiplin dan kerja sama, LBB buat melatih tanggung jawab dan ketelitian, plus pembinaan manajemen organisasi yang dipraktikkan lewat pembuatan proposal kelompok. Mereka juga dapat pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, seperti bikin video bertema "Kepak Sayap GARUDA Jelajah NKRI". Pentas seni dan budaya juga masuk agenda jadi ruang ekspresi sekaligus penguat rasa persatuan.

Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, menyampaikan bahwa program ini menjadi tonggak baru pembinaan ideologi Pancasila. GARUDA menawarkan pendekatan yang edukatif, inspiratif, dan benar-benar fokus di pembentukan karakter bangsa. Seluruh peserta dikirim ke Jakarta dengan fasilitas penuh; transportasi, akomodasi, dan pendampingan dari tiap provinsi semuanya disiapkan BPIP. Sementara di wilayah, DPPI juga mulai melakukan kegiatan. Kabupaten Berau, misalnya, sudah melantik Pelaksana DPPI periode 2025-2029 sebagai langkah strategis memperkuat ideologi bangsa di kalangan pemuda. Di Jepara, pelantikan DPPI dilakukan secara khidmat dan disambung dengan program Pancasila Saka Adikara dan Pancasila Saka Adisiswa.

Wakil Bupati Jepara dalam sambutannya menegaskan, peran Duta Pancasila itu penting banget sebagai agen perubahan dan penjaga nilai kebangsaan di lingkungannya. "Kalian adalah ujung tombak, kalian duta nilai, bukan cuma simbol. Tugas kalian tidak cukup hanya menghafal lima sila, tapi mewujudkannya dalam kepemimpinan, pergaulan, semangat gotong royong, dan menjaga harmoni dalam keberagaman," ujarnya dengan tegas. Harapannya, pelantikan ini bisa jadi ladang pengabdian yang tumbuh dari rasa cinta tanah air, dan lahirnya generasi muda yang cerdas, santun, dan berjiwa kebangsaan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. (Nailla, 2026) Menyampaikan, meskipun Indonesia telah punya kerangka aturan yang cukup memadai, masih ada celah besar dalam penerapan prinsip human security, terutama di bidang keamanan budaya. Banyak kebijakan

masih terpecah-pecah, dan koordinasi antar sektor lemah. Hal ini juga terasa di program BPIP dan DPPI, serta jangkauannya belum sebanding dengan besarnya ancaman erosi identitas budaya.

Masalah yang paling jelas adalah pendekatan yang digunakan masih bersifat formal dan sifatnya seremonial. Program BPIP dan DPPI belum benar-benar menyentuh cultural security secara masif, padahal ancaman non-tradisional makin nyata. Mari kita bandingkan, pemerintah telah memiliki BNPT untuk menangani terorisme dan BNPB untuk penanganan bencana, tapi perlindungan identitas budaya dari gempuran globalisasi dan era digital, masih belum ada institusi atau program khusus yang kuat. Koordinasi lintas sektor antara BPIP, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital juga perlu dibenahi. Masing-masing program berjalan secara terpisah dan masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Menurut Alami (2015), pernah dikatakan bahwa kelemahan utama Indonesia dalam isu keamanan nontradisional adalah koordinasinya yang lemah dan belum adanya peta jalan yang jelas.

Ke depannya, BPIP dan DPPI harus memperluas jangkauan program. Jangan sekadar berputar di lingkungan Paskibraka, tapi harus menysasar anak muda yang lebih luas, terutama lewat platform digital. Adaptasi digital itu sudah jadi kunci utama buat menjaga ketahanan budaya lokal. Kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membuat konten yang menarik berbasis Pancasila dan budaya lokal di media sosial bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Soalnya, hari ini sebagian besar generasi muda justru lebih banyak ada di dunia digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembahasan ini benar-benar memperlihatkan bahwa identitas budaya dan sejarah nasional kita sedang terjepit. Bukti-buktinya? Jelas kelihatan di sekitar: bahasa daerah mulai menghilang satu per satu, semangat gotong royong yang dulu mengakar kini hanya sesekali muncul, dan anak-anak muda makin asing dengan makna Sumpah Pemuda atau Proklamasi (Rahayu dkk., 2025; Farhan, 2025). Tiga hal penting seperti; bahasa, tradisi, dan kesadaran sejarah yang sebenarnya saling terhubung dan saling menguatkan. Hilang satu, yang lain ikut goyah.

Masalah ini tidak bisa dianggap ringan. Ia memenuhi semua ciri ancaman non-tradisional versi Alami (2015). Efeknya melebar, tidak berhenti di wilayah budaya saja. Ia merembet ke sosial, ekonomi, ideologi, bahkan urusan pertahanan. Sumber masalahnya juga jelas: globalisasi yang didorong oleh kekuatan perusahaan digital multinasional. Sekarang, ancaman

semacam ini sudah masuk sebagai isu keamanan nasional. Lembaga negara seperti BPIP ikut turun tangan, menandakan betapa seriusnya persoalan ini (Pugu, 2025). Ironisnya, era digital memperburuk situasi. Algoritma media sosial lebih suka memunculkan budaya asing daripada karya-karya lokal (Listriyani, Agustian, & Himawati, 2024). Anak-anak Gen Z bisa berjam-jam tenggelam di dunia maya, tapi makin jarang menggunakan bahasa sendiri atau tertarik dengan tradisi lokal. Inilah yang pernah dicetuskan Khamenei sebagai "perang budaya senyap" (Faisal Tehrani, 2026).

Dari sisi kebijakan, upaya pemerintah lewat BPIP dan DPPI masih banyak bolongnya. Program seperti GARUDA, misalnya, cenderung formal dan belum benar-benar menyentuh kehidupan digital sehari-hari. Program ini masih terbatas, sektornya berjalan sendiri-sendiri, koordinasinya lemah (Nailla, 2026). Akibatnya, pengikisan identitas berjalan terus, dan ini mengancam daya tahan bangsa dari aspek sosial, ideologi, ekonomi, sampai pertahanan (Rofi'i & Halid, 2025; Pugu, 2025). Penelitian ini juga tak luput dari keterbatasan karena berbasis studi pustaka, temuan yang ada sifatnya kualitatif dan tidak didukung data kuantitatif. Selain itu, bahasannya fokus pada Indonesia, jadi hati-hati kalau mau dibandingkan dengan negara lain.

Dari sini, ada beberapa saran yang bisa diajukan. Pemerintah butuh peta jalan perlindungan identitas budaya yang konkret, terukur, dan punya target jangka pendek sampai panjang. Jangan ada lagi program jalan sendiri-sendiri. BPIP, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital harus benar-benar kompak. Program BPIP dan DPPI juga mesti bergerak lebih luas. Jangan berhenti di Paskibraka; sasar generasi muda lain lewat platform digital. Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menciptakan konten kreatif berbasis Pancasila dan budaya lokal di TikTok, Instagram, atau YouTube menjadi sangat penting. Program GARUDA jangan hanya proyek musiman saja, melainkan harus dikembangkan jadi agenda nasional, berkesinambungan. DPPI juga perlu pelatihan digital agar mampu menyebarkan nilai kebangsaan dengan cara yang cocok buat anak muda.

Kementerian Pendidikan punya pekerjaan rumah besar. Kurikulum muatan lokal dan sejarah perlu direvitalisasi, dibuat makin relevan dan menarik. Pendidikan karakter berbasis Pancasila jangan cuma formalitas; harus benar-benar masuk ke segala aspek pembelajaran. Manfaatkan teknologi digital, gamifikasi, dan konten interaktif supaya pelajar tertarik. Untuk generasi muda, jangan cuma menonton. Lestarikan tradisi, gunakan bahasa dan produk lokal dengan bangga, aktif di organisasi berbasis budaya, serta jadi kreator konten digital yang mengangkat budaya dan sejarah Indonesia dengan cara yang segar. Dengan begitu, mereka

punya posisi yang kuat di tengah budaya global. Dan jangan lupa jadilah pengguna internet yang kritis, jangan asal menelan konten asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila.

Buat peneliti selanjutnya, perlu riset kuantitatif untuk mengukur seberapa besar erosi identitas budaya ini secara nyata. Studi banding dengan negara-negara lain yang menghadapi tantangan seperti; Malaysia, Thailand, Jepang—juga bisa membantu, supaya kita bisa belajar dari strategi mereka yang sudah terbukti. Patut juga ditelaah seberapa efektif program BPIP dan DPPI di lapangan serta menajaki pemanfaatan kecerdasan buatan dan algoritma digital untuk promosi budaya lokal. Harapannya, pelestarian identitas budaya ke depan bukan cuma jadi omongan, tapi benar-benar terasa hasilnya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Alami, A. N. (2015). Politik luar negeri Indonesia dan isu keamanan non-tradisional. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Non-Tradisional*, 1-17.
- Allahyari, S., Mohammadzadeh, A., Ashrafi, A., & Shariati, S. (2022). Cultural security in the thought of Imam Khamenei. *Political Sociology of the Islamic Revolution*, 3(2), 271-300.
- Aminah, S., Wardhani, S. B., Dugis, V., & Susanto, M. A. (2025). The paradox of nation branding: Mandalika SEZ. *Asian Journal of Comparative Politics*.
- Ashri Rahmatia, O. S. R. K. D. S. (2024). Individualisme Gen Z sebagai tantangan kolektivisme di Indonesia. *Journal of Society Bridge*, 2, 186-196.
- BPIP Kabupaten Berau. (2025). Pengukuhan pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) periode 2025-2029. *Pemerintah Kabupaten Berau*.
- BPIP Kabupaten Jepara. (2025). Pelantikan pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Jepara. *Pemerintah Kabupaten Jepara*.
- BPIP. (2021). Pancasila milik kita. *bPIP.go.id*.
- BPIP. (2025). GARUDA: Gladian sentra Paskibra untuk Indonesia tahun 2025. *Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*.
- Bräuchler, B. (2022). Creative peacebuilding in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*.
- Cakranegara, J. J. S. (2020). Membangun kesadaran sejarah kritis dan integratif untuk Indonesia maju. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 1-18.
- Canfield, C. (2023). *Community security and heritage* (Tesis). Australian National University.
- Cultural Sociology of Resistance. (2025). *Journal of Cultural Sociology*, 10.30465/scs.2025.51233.2978.
- Fadilla, Alfiyah, & Maftucha. (2025). Tantangan dan strategi pelestarian warisan budaya di era globalisasi. *Jurnal Sosiolum*, Universitas Negeri Semarang.
- Faisal Tehrani. (2026). Kolum: Perang di mata Ali Khamenei. *Malaysiakini*.
- Farhan, M. F. (2025). Globalisasi dan identitas nasional. *Maliki Interdisciplinary Journal*, UIN Malang.

- Handbook of cultural security*. (2018). Edward Elgar Publishing.
- Herriman, N. (2010). Objects of manipulation: Culture wars in Indonesia. *South East Asia Research*, 18(3).
- Husada. (2025). Identitas nasional di era digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, UIN Malang.
- Iwan Setiawan, F. G. C., & R. (2024). Pancasila sebagai landasan Gen Z dalam mempertahankan nilai persatuan pada era globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9, 54-65.
- Khamenei, A. A. (2005). *Perang kebudayaan*. Penerbit Cahaya.
- Khamenei, A. A. (2025). Iran faces propaganda war aimed at its downfall. *Iran International*.
- listriyani, D., Agustian, Y. T., & Himawati, I. P. (2024). Melestarikan identitas budaya di era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Megawati Khoirunisa, P. A. T. R. I. C. I. A. F. E. B. R. I. Y. A. N. T. I. R. U. S. L. I. (2023). Transformasi nilai-nilai kebudayaan dalam era digital: Analisis pengaruh media sosial terhadap budaya masyarakat Indonesia. *Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra*, 3, 3-6.
- Meng, H., Li, X., Wang, Z., & Sun, J. (2025). Cultural security in globalization: A bibliometric analysis. *Technology in Society*, Elsevier.
- Nailla, V. A. (2026). Implementasi human security: Perspektif manajemen populasi terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. *At-Tanwir Law Review*, 6(1), 1-22.
- Nemeth, E. (2015). *Cultural security: Evaluating the power of culture in international affairs*. Imperial College Press.
- Nurhaidah, M. I. M. (2015). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 1-14.
- Ozer, S., & Obaidi, M. (2022). Globalization and radicalization. In *Globalized identities*. Palgrave Macmillan.
- Panahi, A. (2015). Cultural invasion and moral insecurity in Imam Khamenei's thought. *Cumhuriyet Science Journal*.
- Pugu, M. R. (2025). *Keamanan non-tradisional*. PT. Sonpedia.
- Rachman, A. R. S. P. (2025). Analisis pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya lokal di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosiologi Indonesia*, 1, 15-21.
- Rahayu, T., Annissa, M., Nakita, Tobing, R. D., Sinaga, H., Sinulingga, S. D. N., & Yunita, S. (2025). Globalisasi dan tantangan identitas nasional: Studi kebudayaan Indonesia. *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(2), 844-854.
- Rahma. (2025). Identitas nasional sebagai ketahanan budaya. *Maliki Interdisciplinary Journal*, UIN Malang.
- Ramdani, D., Agustina, D. D., & Sudarto. (2025). *Peran organisasi pemuda dalam pelestarian identitas budaya lokal*. Unigal Press.
- Ramli, R., Othman, M. R., Idris, F., & Daud, M. (2012). Towards a modified approach to human security in Southeast Asia. *Pertanika JSSH*, 20(3).

- Rofi'i, A., & Halid, A. (2025). Ketahanan budaya lokal di era globalisasi. *Jurnal Budaya*, Universitas Brawijaya.
- Sarah, Y. A., dkk. (2026). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas nasional di kalangan generasi Z. *Jurnal PPKn*, AP3KnI.
- Security, Islam, and Indonesia*. (2024). ScienceDirect/Elsevier.
- Sounding identity in the digital age: Eastern Indonesia's musical voices on TikTok. (2025). *Frontiers in Communication*.